

DAFTAR BANSOS YANG CAIR APRIL 2022: BLT MINYAK GORENG HINGGA BSU



sumber gambar: Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat per April 2022. Kemensos akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar 300 ribu kepada masyarakat pada April 2022. Penyaluran BLT minyak goreng ini akan dilakukan bersamaan dengan penyaluran bansos lainnya, antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Berikut daftar Bansos yang akan cair per April 2022:

1. BLT Minyak Goreng

Pemerintah memberikan BLT minyak goreng melalui penebalan dan perluasan bantuan sosial Kartu Sembako kepada masyarakat penerima bansos PKH dan bansos Sembako sebanyak 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan data Kemensos, serta bantuan tunai pangan bagi 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Warung, utamanya usaha makanan.

BLT minyak goreng ini merupakan tambahan penebalan dan perluasan atas Kartu Sembako regular (*eksisting*) yang telah diberikan sebelumnya. Dengan demikian, pada April 2022, penerima kartu sembako regular masih tetap akan menerima bansos regular sebesar Rp200 ribu per penerima manfaat, dan ditambah dengan bantuan tambahan ini sebesar Rp300 ribu per penerima manfaat.

Adapun untuk bantuan tunai kepada PKL Makanan akan diberikan sebesar Rp300 ribu per penerima manfaat, yang akan disalurkan sekaligus pada bulan April 2022. Penyaluran bantuan tunai pangan kepada PKL Makanan ini akan dilaksanakan oleh TNI/Polri. Masyarakat bisa mengecek melalui cekbansos.kemensos.go.id.

2. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Bansos ini diberikan Pemerintah kepada seluruh pekerja yang memiliki pendapatan bulanan di bawah Rp 3,5 juta. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi, skema BSU terbaru rencananya akan cair pada April 2022 serta ditargetkan untuk 8,8 juta pekerja dengan total anggaran Rp8,8 triliun.

Bagi masyarakat yang memenuhi kriteria, dapat mengecek status penerima BSU melalui laman resmi bpjsketenagakerjaan.go.id dan kemnaker.go.id.

3. Kartu Prakerja

Pemerintah kembali melanjutkan Program Kartu Prakerja Gelombang 25 pada 2022 mengingat antusiasme dan dampak positif yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Para peserta yang lolos nantinya akan mendapatkan BLT sebesar Rp2,5 juta yang akan dicairkan langsung ke rekening. Adapun cara mengecek hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 25 melalui prakerja.go.id. Kemudian Log in ke akun Kartu Prakerja dengan menggunakan *email* serta *password* yang sudah terdaftar. Lakukan pengecekan pada *dashboard* akun Kartu Prakerja, jika lolos, peserta harus mengikuti tata cara untuk dapat melihat nomor kartu prakerja dan mendapatkan bansos Kartu Prakerja gelombang 25.

4. Bansos BPNT

Pemerintah kembali menjadwalkan bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau disebut kartu sembako yang juga akan cair pada April 2022. Mekanisme penyaluran bantuan BPNT dicairkan sekaligus untuk 3 bulan ke depan. Adapun rincian perolehan bansos perbulan Rp200 ribu sehingga penerima akan menerima nominal bansos sebesar Rp 600 ribu. Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial ini kepada 18,8 juta keluarga yang namanya telah tercantum dalam portal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Adapun Bagi Anda yang ingin mendaftar sebagai penerima manfaat 2022 dapat mengakses laman resmi dtk.kemensos.go.id.

5. Bansos PKH

Pemerintah melalui Kementerian Sosial masih memberikan bantuan sosial PKH pada 2022.

Bansos ini diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu yang terdaftar di dalam DTKS. Penerima bansos PKH akan mendapatkan bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan atau Rp600 ribu per tiga bulan. berdasarkan laman kemensos.go.id, untuk mendapatkan fasilitas bansos PKH, masyarakat dapat mendaftar dan melakukan pengajuan nama ke Desa atau kelurahan satuan tinggal setempat.

Caranya dengan membawa beberapa identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Perangkat desa melakukan verifikasi terkait tingkat kelayakan mendapatkan bansos. Perangkat desa mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas/instansi Sosial.

Penyaluran pola Bantuan PKH diatur dalam skema berikut:

- a. Penyaluran PKH tahap I: Januari, Februari dan Maret.
- b. Penyaluran PKH tahap II: April, Mei dan Juni.
- c. Penyaluran PKH tahap III: Juli, Agustus dan September.
- d. Penyaluran PKH tahap IV: Oktober, November dan Desember.

Sumber berita:

1. <https://m.jpnn.com/news/daftar-bansos-yang-cair-april-2022-ada-blt-minyak-goreng>, Minggu, 10 April 2022.
2. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220406/9/1519728/daftar-bansos-yang-cair-april-2022-blt-minyak-goreng-hingga-bsu>, Rabu, 6 April 2022.

Catatan:

Bentuk dari bansos yang diberikan Kementerian Sosial sebelum masa pandemi adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

1. Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu jaring pengaman sosial untuk keluarga miskin, agar dapat memperkuat daya beli, meningkatkan nutrisi, meningkatkan gizi serta daya tahan tubuh anak, ibu hamil, penyandang distabilitas berat dan lanjut usia, meningkatkan konsumsi masyarakat dan menjaga pendapatan serta pengeluaran keluarga miskin agar terhindar dari risiko sosial dalam masa pandemi. Bansos PKH disalurkan setiap bulan secara non tunai ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui e-warong/agen bank, ATM dan Teller Bank dan dapat diambil menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kemensos menetapkan kriteria bansos PKH, yang kategorinya terdiri atas:

- a. Ibu hamil/nifas dengan maksimal 2 (dua) kehamilan dihitung dari mulai pernikahan, berhak mendapatkan bantuan Rp3.000.000,00 per tahun.
- b. Anak usia dini paling banyak 2 (dua) orang di dalam keluarga dihitung dari mulai pernikahan, berhak mendapatkan bantuan Rp3.000.000,00 per tahun.
- c. Anak usia sekolah SD/ sederajat berhak mendapatkan bantuan Rp900.000,00 per tahun.
- d. Anak usia SMP/ sederajat berhak mendapatkan bantuan Rp1.500.000,00 per tahun.
- e. Anak usia SMA/ sederajat berhak mendapatkan bantuan Rp2.000.000,00 per tahun.
- f. Lanjut usia dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun maksimal 1 (satu) orang di dalam keluarga PKH, berhak mendapatkan bantuan Rp2.400.000,00 per tahun.
- g. Penyandang disabilitas berat maksimal 1 (satu) orang di dalam keluarga PKH, berhak mendapatkan bantuan Rp2.400.000,00 per tahun.

Dalam bantuan PKH penghitungan bansos dibatasi maksimal empat orang dalam satu keluarga.

2. Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) yaitu bansos kepada masyarakat yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui uang elektronik yang selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas program bansos pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp150.000/KPM/ bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli seperti sayur-mayur, buah-buahan, beras, kacang-kacangan, telur, daging sapi, dan lain-lain.

Sehubungan dengan wabah Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini, pemerintah menerbitkan Perpu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Menindaklanjuti Perpu tersebut, Kemensos menerbitkan Surat Keputusan Menteri Sosial No. 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Covid-19.

Pelaksanaan Bansos tunai diberikan kepada keluarga yang tercantum dalam DTKS yang tidak terdaftar sebagai penerima PKH, Program Sembako dan tinggal di luar wilayah Bantuan Sosial Sembako. Besaran nilai bansos tunai sejumlah Rp600.000 per keluarga per bulan. Mekanisme penyaluran bansos tunai disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

Pelaksanaan bansos sembako diberikan kepada keluarga yang tercantum pada DTKS yang tidak terdaftar sebagai penerima PKH.

Masa Pandemi Covid-19 menyebabkan dampak yang buruk terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Salah satu upaya perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah melalui Kemensos dan Kementerian Ketenagakerjaan adalah memberikan skema program bansos bagi masyarakat miskin, yaitu :

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng

Diberikan mulai April 2022. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat. Penyalurannya akan melalui Kemensos. Besaran BLT Rp100 ribu per bulan Mekanismenya disalurkan pada April 2022 untuk 3 bulan sekaligus (April, Mei, dan Juni)

Syarat penerima BLT minyak goreng:

- Keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- Keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
- Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan.

2. Bantuan Subsidi Upah

Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Covid-19. Penyaluran bantuan subsidi tahun ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 500.000,-/bulan selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp 1.000.000,-

Persyaratannya :

- a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.
- b. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) s.d. Juni 2021.
- c. Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp4.800.000.
- d. Bekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah.
- e. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan *real estate*, perdagangan dan jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK).

3. Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Program Kartu Prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan.

Penerimaan manfaat Kartu Prakerja adalah pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Persyaratan penerima kartu prakerja yaitu warga negara Indonesia berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Untuk merespon dampak dari pandemi Covid-19, Program Kartu Prakerja untuk sementara waktu akan diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya.

Dalam 1 (satu) Kartu Keluarga hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) NIK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.